

**PENGARUH IDENTITAS NASIONAL BANGSA KOREA TERHADAP
KEBIJAKAN LUAR NEGERI UNIFIKASI KOREA SELATAN DENGAN
KOREA UTARA**

**Nurul Hanafiaty
071511233047**

**Departemen Hubungan Internasional
Universitas Airlangga**

ABSTRAK

Unifikasi Korea Selatan dan Korea Utara telah mengalami dinamika panjang dalam perjuangannya. Korea Selatan sendiri dalam perjuangan mewujudkan unifikasi juga mengalami perubahan sikap terhadap Korea Utara baik pemerintah maupun masyarakat sipilnya. Pemerintah Korea Selatan yang lebih memihak unifikasi menuangkan pemikiran tersebut melalui kebijakan luar negerinya terkait unifikasi. Sedangkan masyarakat Korea Selatan lebih menolak terhadap unifikasi. Seiring dengan berjalannya waktu, penolakan masyarakat Korea Selatan terhadap unifikasi semakin besar. Pemerintah Korea Selatan memiliki kebijakan luar negeri terbesar terkait unifikasi yaitu kebijakan Sunshine. Kebijakan tersebut dijalankan oleh tiga presiden sekaligus, yaitu Presiden Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun, dan Moon Jae-in. Kebijakan tersebut membuat pendekatan Korea Selatan terhadap Korea Utara konsisten untuk mengambil jalan perdamaian. Namun, dengan adanya penolakan masyarakat sipilnya yang semakin besar, unifikasi sulit untuk dicapai. Oleh karena itu definisi unifikasi sendiri bergeser bukan untuk menyatukan dua negara Korea lagi, tetapi untuk menghilangkan ketegangan di Semenanjung Korea. Tetapi, unifikasi tetap diperjuangkan Korea Selatan melalui kebijakan-kebijakan luar negerinya.

Kata Kunci: *Unifikasi, Korea Selatan, Korea Utara, Kebijakan Luar Negeri, Sunshine*

The unification of South and North Korea has been through ups and downs and has been going through a long dynamic of its process. South Korean itself has been through some changes of attitude towards North Korea in the process of achieving unification, both in the governments and citizen level. The government which has bigger concern towards unification then tries to achieve the unification by making foreign policies of unification. While the citizen of South Korea have less concern towards unification because of cost and benefits reasons. As time passed, the citizen of South Korea had the change of attitude which opposed more towards unification. The Government of South Korea has the grandest foreign policy of unification which is called Sunshine policy. The policy itself makes South Korea consistent towards the means of unification which by peaceful ways. But with the big opposition from the citizen, making the restraints for unification to be achieved. The definition of unification for South Korean itself then has been changed from the uniting two Koreans then became lessening the tensions in Korean Peninsula. But unification still became the priority of the foreign policy of South Korea.

Keywords: *Unification, South Korea, North Korea, Foreign Policy, Sunshine*

Semenanjung Korea mengalami sejarah panjang terkait dengan proses separasi yang mana kemudian terbagi dalam Korea Selatan dan Korea Utara. Kondisi geografis Semenanjung Korea yang kecil tidak pernah menarik perhatian dari negara tetangganya. Namun, letak geografis Semenanjung Korea yang strategis kemudian menarik negara-negara tetangganya untuk mengontrol Semenanjung Korea. Keadaan Semenanjung Korea 196 km di bagian tenggara berbatasan langsung dengan pulau Kyushu dan Honshu Jepang, dan di bagian barat, dengan jarak yang hampir sama dengan jarak di bagian tenggara, berbatasan langsung dengan Semenanjung Shantung Tiongkok. Di bagian barat laut, ada sungai Yalu yang menjadi batas Semenanjung Korea dan Manchuria, Sementara bagian timur laut Tiongkok (McCune, dalam Hak-joon, 1977). Berada di posisi yang strategis tersebut, Semenanjung Korea kemudian menjadi pusat dari kontestasi internasional. Korea sendiri menjadi jembatan kontestasi kekuatan di Asia dan Pasifik. Oleh karena itu, Semenanjung Korea sering dijadikan aliansi oleh kekuatan-kekuatan yang saling berkontestasi.

Sejarah Persamaan Identitas Bangsa Korea pada Proses Separasi Semenanjung Korea

Mitos berpengaruh penting bagi pembentukan kebijakan luar negeri bagi Korea Selatan. Pengaruh Tiongkok dan nilai-nilai sejarahnya kemudian menjadi dasar terbentuknya mitos yang diyakini oleh masyarakat Korea. Korea yang terbentuk pertama kali melalui dinasti Choson pada abad ke-empat SM, dibentuk oleh Tan'gunwanggom yaitu seorang nenek moyang orang Korea. Choson kemudian semakin berkembang akibat peranan dari Kija, yaitu imigran politik Tiongkok. Pengaruh Tiongkok kemudian semakin besar di Korea ketika dinasti Han melebarkan kekuatannya ke Korea dan berhasil membangun empat basis pemerintahan pada tahun 108 SM. Namun, tiga kerajaan besar Korea, yaitu Shilla, Koguryo, dan Paekche berhasil menghancurkan basis pemerintahan tersebut pada tahun 313 Masehi. Setelah berhasil menghancurkan kedudukan Tiongkok di Korea, tiga dinasti besar Korea tersebut kemudian memerangi satu sama lain untuk menatukan Semenanjung Korea dibawah kekuasaan masing-masing. Tetapi unifikasi di Semenanjung Korea berhasil dicapai oleh dinasti Silla. Silla memanfaatkan ambisi dinasti T'ang untuk menghancurkan Koguryo, dan selanjutnya menjalin aliansi dengan dinasti T'ang untuk mengalahkan dinasti Koguryo dan Paekche pada tahun 668 Masehi. Namun,

sebagai imbalan atas aliansi dengan dinasti T'ang, wilayah bagian utara, yaitu P'aesu yang sebelumnya menjadi taklukan dinasti Koguryo diambil alih oleh dinasti T'ang. Masyarakat yang sebelumnya menjadi rakyat Koguryo kemudian mendirikan daerah sendiri bersama masyarakat Malgal di bagian utara Manchuria, dan mengambil alih sebagian besar wilayah yang sebelumnya menjadi pemerintahan Koguryo. Sejak saat itu kemudian Semenanjung Korea mulai memasuki era dinasti utara yaitu Parhae, dan dinasti selatan yaitu Silla (Hak-joon, 1977). Era dinasti selatan-utara di Korea berakhir di awal abad 10, hal tersebut dikarenakan Goryeo berhasil mengambil wilayah kekuasaan Silla dan wilayah Parhae daerah batas Yalu-Tumen pada tahun 936. Pembahasan mengenai pemisahan Semenanjung Korea pertama kali dibahas oleh negara lain yaitu ketika terjadi negosiasi perdamaian antara Jepang dan Tiongkok. Pada Juni 1593, Hideyoshi mengusulkan bahwa empat Sementara bagian utara dipimpin oleh Korea, dan empat Sementara bagian selatan diberikan kepada Jepang. Pada 29 Agustus 1910, Jepang memproklamkan aneksasi atas Korea. Dinasti Yi menghilang, dan Korea menjadi koloni Jepang selama 35 tahun dan berakhir ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia II pada tahun 1945.

Dengan adanya warisan negara berdaulat dari era kerajaan, Korea memiliki nilai nasionalisme yang kuat. Khususnya setelah Presiden Woodrow Wilson mengemukakan doktrin *self-determination* pada *Paris Peace Conference* pada tahun 1919. Doktrin tersebut meski tidak ditujukan untuk Korea secara langsung, tapi diyakini oleh masyarakat Korea menjadi keterpihakan Amerika Serikat atas kemerdekaan negara-negara kecil seperti Korea. Sejak adanya keyakinan tersebut, Korea mulai aktif melakukan perjuangan-perjuangan kemerdekaan. Pada 1 Maret 1919, kelompok yang terdiri dari 33 pemimpin pergerakan nasionalis mendeklarasikan *Declaration of Independence*, yang mana merupakan deklarasi damai yang diikuti 2.000.000 orang. Meski kemudian dibubarkan oleh pasukan Jepang, pergerakan tersebut menjadi titik awal perjuangan kemerdekaan baik di dalam maupun diluar Korea. Hasil dari pergerakan tersebut adalah dibentuknya Korean *Provisional Government-in-exile* atau Pemerintahan Sementara Masyarakat Pengasingan Korea (Hak-joon, 1977).

Pada 7 Maret 1919, masyarakat dan pengasingan Korea di Manchuria dan Siberia membangun pemerintahan Korea dengan Son Pyong-hui sebagai Presiden. Pada tanggal 10 April 1919 pengasingan Korea di Tiongkok dan Amerika Serikat membuat pemerintahan yang baru dengan Syngnam Rhee sebagai Perdana Menteri. 13 hari kemudian, pemeritahan Korea yang ketiga dibentuk secara diam-diam dengan Syngnam Rhee sebagai Presiden. Pergerakan kemandirian di Korea sendiri berasal dari dalam dan luar Korea. Pergerakan di luar Korea

sendiri berasal dari Pemerintahan Sementara yang berada di negara-negara luar Korea. Sedangkan di Manchuria dan Siberia sendiri, dilakukan pergerakan anti-Jepang oleh militan sayap kiri. Komunis Korea sendiri sebenarnya telah muncul bahkan sebelum pergerakan tahun 1919 dikalangan imigran dan pengasingan Korea di Sementara Maritim Rusia dan Siberia. Terinspirasi oleh Revolusi Rusia pada tahun 1917, beberapa imigran dan pengasingan Korea tersebut mendirikan komunitas Partai Komunis Irkutsk Korea dan Partai Sosialis Korea di Khabarovsk pada tahun 1918 dan 1919. Pada Januari 1921, Partai Sosialis Korea berpindah ke Shanghai dan berganti nama menjadi Partai Komunis Korea dibawah pimpinan Yi Tog-hui yang telah memisahkan diri dari Pemerintahan Sementara Korea. Sedangkan pergerakan di dalam negeri Korea sendiri berasal dari dua kelompok yaitu kelompok sayap kanan dan Komunis, menyusul adanya kegagalan gerakan pada tahun 1919. Kelompok sayap kanan dinamai dengan *Nationalist Reformation Principles*, yang mengadvokasi perkembangan sumber-sumber daya alam dan manusia Korea dan menunda pergerakan kemerdekaan untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik di masa depan. Kelompok sayap kanan ini kemudian menjadi kelompok yang lebih kuat dibanding kelompok Komunis. Kelompok Komunis kemudian menyatakan pergerakan kelompok sayap kanan sebagai taktik borjuis yang dibuat untuk memperkaya sekelompok kecil industrialis dengan mengeksploitasi masyarakat. Kelompok Komunis lebih memilih hubungan dekat dengan Uni Soviet karena adanya pemikiran bahwa Soviet akan membantu pergerakan emansipasi secara umum dan pergerakan anti-Jepang, khususnya di Asia bagian Timur dan Tenggara. banyaknya pergerakan yang ada menghasilkan banyak kelompok dan pemimpin yang kemudian sulit untuk disatukan. Kurangnya persatuan diantara kelompok-kelompok yang muncul ketika era perjuangan kemerdekaan menjadi kesalahan fatal, yang kemudian semakin ditegaskan dengan enggannya Amerika Serikat mengakui satupun dari kelompok pengasingan masyarakat Korea yang ada pada April 1942.

Meski para pemimpin Korea sendiri terlibat dalam terpisahnya Korea, namun peran *Allied Powers*, khususnya Amerika Serikat dan Uni Soviet turut berperan dalam terpisahnya Semenanjung Korea. Bagi *Allied Powers* sendiri Korea bukanlah negara yang menarik perhatian. Baru ketika *Allied Powers* membahas mengenai keadaan paska perang di Asia, kemerdekaan Korea mulai dipertimbangkan. Tindakan mendaratnya pasukan militer Korea di Uni Soviet ketika perang Korea atas Jepang, bisa dijadikan tanda diterimanya penyerahan diri Jepang di Semenanjung Korea. Duta Besar Amerika Serikat atas Korea kemudian mendesak Presiden Truman untuk segera menindak lanjuti Soviet. Namun, Presiden Truman menolak gagasan-gagasan tersebut dikarenakan, menurut Truman sendiri, penyerahan diri Jepang merupakan akhir dari perang selama bertahun-tahun yang harusnya tidak diciderai dengan

maksud lain. Opsi yang dipilih Presiden Truman untuk menangkai penguasaan Uni Soviet atas Korea kemudian adalah dengan membagi Korea pada *thirty-eight parallel* (Hak-joon, 1977). Amerika Serikat kemudian mengajukan untuk Uni Soviet menerima wilayah penyerahan Jepang di bagian utara *thirty-eight parallel* dan Amerika Serikat dibagian wilayah garis tersebut. Rekomendasi Amerika Serikat tersebut juga diikuti klausula penting bahwa administrasi terkait kependudukan sipil sepenuhnya menjadi tanggungjawab masing-masing negara penguasa wilayah yang telah ditentukan. Pada tanggal 2 September 1945, penyerahan wilayah Jepang atas bagian utara *thirty-eight parallel* diberikan pada Uni Soviet dan bagian selatan *thirty-eight parallel* diberikan kepada Amerika Serikat resmi ditandatangani. Hal tersebut kemudian menjadi awal pemisahan Korea secara resmi dibentuk.

Kebijakan Pemerintah Korea Selatan terhadap Unifikasi

Sejak terpisahnya Semenanjung Korea, Korea Selatan telah gencar melakukan upaya pendekatan kembali dengan Korea Utara melalui berbagai kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri tersebut pun berbeda-beda tiap presiden yang memimpin meskipun prinsip dasar yang digunakan sama, yaitu melalui jalan yang *peaceful* tanpa adanya campur tangan senjata yang digunakan. Pada sejarah Korea Selatan, terdapat empat masa pemerintahan yang mana komitmen akan proses unifikasi tidak terbantahkan, yaitu Presiden Park Chung-hee, Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun, dan Moon Jae-in. Hal tersebut terlihat dalam kebijakan-kebijakan luar negerinya yang sangat fokus terhadap proses unifikasi dan *rapprochement* (Chung Hee, 1987).

Adanya krisis yang dihadapi Korea Selatan setelah Amerika Serikat memutuskan untuk menarik pasukannya kemudian mendorong Presiden Park Chung-hee untuk mengajukan *détente* untuk Korea. Pada tanggal 15 Agustus 1970, pada pidato *Liberation Day*, Presiden Park mengemukakan gagasan kemungkinan untuk menghapus, sedikit demi sedikit, berbagai batasan yang telah terbentuk antara Korea Selatan dan Korea Utara, demi kepentingan menciptakan kesepakatan bersama terkait unifikasi dan sebagai bentuk konsiderasi kemanusiaan. Presiden Park juga mengajak Korea Utara untuk bersaing secara sehat membuktikan sistem mana yang dapat memberikan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat, dan lingkungan mana yang lebih aman untuk ditempati, daripada fokus pada persiapan perang yang mengorbankan kesejahteraan hidup masyarakat di Korea Utara (Chung-hee, 1987).

Dengan kata lain, Presiden Park mengemukakan gagasan bagi Korea Selatan dan Korea Utara untuk menghentikan kebencian bersama, dan konfrontasi yang tidak bermanfaat, serta

memulai hubungan baru untuk mengurangi ketegangan dan membangun dasar baru untuk kerjasama dan integrasi politik. Gagasan yang kemukakan oleh Presiden Park tersebut menjadi gagasan yang bersejarah, yang kemudian berhasil menciptakan konsepsi baru terkait hubungan Seoul-Pyongyang, dan juga menandai hubungan baru yang sebelumnya terbentuk dengan karakter yang penuh kecurigaan satu sama lain, dan permusuhan dari dua negara yang terbentuk dari bangsa yang sama, akibat kontestasi Perang Dingin (Chung-hee, 1987).

Presiden Park kemudian membentuk konstitusi *Yushin*, yaitu konstitusi yang merupakan alat struktural baru untuk memastikan stabilitas parlementer yang sedang memimpin, dan secara bersamaan memastikan persyaratan stabilitas dan efisiensi realistis dari derajat maksimum sistem liberal yang konsisten, sehingga dapat diterapkan di Korea Selatan. Memastikan keseimbangan jalannya efisiensi parlementer dan sistem yang semakin liberal bukanlah hal yang mudah bagi Korea Selatan, mengingat Korea Selatan di tahun 1970-an masih merupakan negara berkembang yang masih meraba-raba sistem tradisi moderen. Selain itu, Korea Selatan masih dalam proses membentuk institusi politik dalam situasi banyaknya ancaman eksternal dan ketidakpastian. Namun, meskipun banyak permasalahan teknis terkait pembentukan konstitusi *Yushin*, dibentuknya konstitusi *Yushin* itu sendiri menjadi keputusan awal yang besar terkait komitmen Korea Selatan terhadap *peacemaking* di Semenanjung Korea. Pemahaman itulah yang kemudian diterima oleh masyarakat Korea Selatan. Presiden Park dan masyarakat Korea Selatan paham bahwa dengan keadaan sistem internasional yang bergejolak di tahun 1970-an, dan agar dapat mengadakan dialog kebijakan baru dengan Korea Utara, Korea Selatan mau tidak mau harus mengubah jalannya sistem politik Korea Selatan itu sendiri (Chung-hee, 1987).

Kebijakan yang kedua adalah Perjanjian Non-agresi. Pada 18 Januari 1974, Presiden Park memberikan sugesti kepada Korea Utara untuk menandatangani perjanjian dengan Korea Selatan yang berisi tidak akan mencampuri urusan satu sama lain apapun keadaannya. Respon Korea Utara terhadap pengajuan Presiden Park tersebut adalah negative, yang mana berlawanan dengan respon yang seharusnya diberikan Korea Utara paska kesepakatan *4th July Communique*. Korea Utara justru meminta perjanjian non-agresi dilakukan oleh Amerika Serikat dan Korea Utara. Hal tersebut kemudian ditanggapi oleh Korea Selatan sebagai bentuk pengkhianatan Korea Utara terhadap niat baik Korea Selatan, dan merupakan symbol ketidakantusiasan Korea Utara akan proses perdamaian di semennanjung Korea (Chung-hee, 1987). Selama pemerintahan Presiden Park Chung-hee sendiri, setelah pengajuan Perjanjian Non-agresi oleh Korea Selatan dan ditolak oleh Korea Utara, kedua negara berhasil

mengadakan beberapa dialog terkait ekonomi, hak asasi manusia, parlementer, dan dialog olahraga (Kwak, 1988).

Setelah gagalnya beberapa dialog dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Park, dialog kembali dilakukan secara konstan oleh Presiden Kim Dae-jong. Pada masa pemerinatahn Presiden Kim ini sendiri, terjadi perubahan konsentrasi kebijakan, bahwa Presiden Kim tidak hanya melihat hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara, tetapi juga mempertimbangkan pentingnya Amerika Serikat dalam kelancaran dialog-dialog Korea Utara dan Korea Selatan kedepannya. Presiden Kim sendiri kemudian mengatakan bahwa hubungan Korea Selatan dan Korea Utara dapat membaik, ketika ketegangan antara Amerika Serikat dengan Korea Utara juga membaik (Institute for National Security Strategy, 2001). Hal tersebut dikarenakan, kesuksesan dialog antara Korea Selatan dan Korea Utara saja tidak cukup untuk menyatukan kembali Semenanjung Korea. Dialog antara Amerika Serikat dengan Korea Utara juga harus dilakukan secara berkesinambungan apabila unifikasi Semenanjung Korea ingin diwujudkan (Institute for National Security Strategy, 2001). Komitmen Presiden Kim terhadap unifikasi juga tidak terbantahkan. Presiden Kim juga berkomitmen untuk membuat kebijakan yang dapat mengajak Korea Utara bernegosiasi dan menghentikan Korea Utara dari isolasi internasional. Pada pidato Kepresidenannya yang pertama, Presiden Kim juga menjadikan agenda rekonsiliasi dan kerjasama dengan Korea Utara sebagai prioritas utama, meskipun Korea Utara terus menunjukkan permusuhan dan Korea Selatan sedang mengalami krisis (Levin & Han, 2002).

Administrasi Pemerintahan Presiden Kim kemudian membuat kebijakan *Sunshine* yang merupakan kebijakan yang telah alam dirancang pada masa pemerintahannya. Kebijakan tersebut bertujuan untuk membebaskan Korea Selatan dan Korea Utara dari situasi perang. Situasi perang tersebut pada saat itu dinamai oleh Presiden Kim sebagai Perang Dingin ke dua antara Korea Selatan dan Korea Utara. Selain itu, kebijakan Sunshine juga dibuat untuk membuat lingkungan kerjasama yang aman dan damai. Presiden Kim sendiri mengakui bahwa unifikasi masihlah sebuah tujuan yang membutuhkan waktu yang lama untuk diwujudkan. Langkah pertama yang harus dilakukan sebagai langkah awal menuju unifikasi adalah, dengan menciptakan keadaan kerjasama yang damai bagi Korea Selatan dan Korea Utara. Kebijakan Sunshine sendiri dibuat ketika *Jeju Peace Forum* digelar pada 16 Juni 2001 (Institute for National Security Strategy, 2001). Selain kebijakan Sunshine yang menunjukkan komitmen Korea Selatan dalam mengupayakan unifikasi secara damai, Pemerintahan Presiden Kim juga membuat Kementerian Unifikasi, yang mengurus masalah-masalah terkait proses pendekatan kembali dengan Korea Utara (Levin & Han, 2002).

Kebijakan *Sunshine* tersebut memiliki tiga prinsip, yaitu tidak ada toleransi terhadap provokasi bersenjata Korea Utara, tidak ada upaya intervensi Korea Selatan terhadap Korea Utara, dan peran aktif Korea Selatan dalam melakukan rekonsiliasi dan kerjasama antara Korea Selatan dan Korea Utara. Tiga prinsip kebijakan tersebut berarti bahwa, Korea Selatan akan melakukan perlindungan diri maksimal dan tidak akan merespon provokasi Korea Utara, namun meski begitu, Korea Selatan juga tidak akan melakukan penyerangan balik kepada rezim Korea Utara. Sebaliknya, Korea Selatan akan melakukan peran aktif dalam inisiasi kerjasama bilateral, dan akan memfasilitasi interaksi Korea Utara dengan Amerika Serikat, Jepang dan komunitas internasional lainnya (Levin & Han, 2002).

Selain itu, kebijakan administrasi Presiden Kim juga memiliki dua komponen utama lain, yaitu terpisahnya aspek politik dan ekonomi. Hal tersebut berarti Korea Selatan akan memiliki akses lebih pada sektor privatnya dalam menentukan keputusan perdagangan dan investasi dengan Korea Utara. Meski Korea Utara telah memulai luncuran-luncuran nuklirnya, Presiden Roh tetap memperluas jangkauan kebijakan *Sunshine* yang diwariskan oleh Presiden Kim. Karena adanya kelanjutan implementasi dari kebijakan *Sunshine* tersebut ditengah semakin kuatnya pemberontakan Korea Utara, maka Korea Selatan mengalami kesulitan dalam mengatur kebijakan dengan Korea Utara, dan secara bersamaan mengatur hubungan dengan Amerika Serikat. Kebijakan yang melibatkan pihak diluar Korea dilakukan dengan tujuan mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea dan membawa perubahan di Korea Utara (Young-ho, 2014).

Kebijakan *Sunshine* juga disebut sebagai Kebijakan untuk Perdamaian dan Kesejahteraan pada era Presiden Roh. Kebijakan *Sunshine* dirancang dengan visi tiga tahapan pembangunan (Hong-nack, 2001). Tahapan pertama, Korea Selatan mengupayakan jalan keluar bagi permasalahan nuklir Korea Utara dan memfasilitasi perdamaian di Semenanjung Korea. Pada tahapan kedua, Korea Selatan mengupayakan kerjasama ekonomi lebih lanjut dengan Korea Utara dan menetapkan dasar bagi rezim perdamaian di Semenanjung Korea. Pada tahapan ketiga, kebijakan *Sunshine* merancang rilisnya rezim perdamaian di Semenanjung Korea (Hong Nack, 2001). Pada implementasi kebijakan terkait Korea Utara tersebut, Presiden Roh menetapkan bahwa kebijakan *Sunshine* mempunyai empat prinsip. Pertama, bahwa semua permasalahan harus diselesaikan dengan dialog. Kedua, prioritas kedua negara Korea haruslah membangun mosi saling percaya dan timbal balik. Ketiga, permasalahan di Semenanjung Korea harus diselesaikan oleh Korea Selatan dan Korea Utara dengan bekerja sama bersama komunitas internasional. Keempat, Korea Selatan akan memastikan transparansi,

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan terkait unifikasi dengan Korea Utara (Straub, 2018).

Moon Jae-in yang dekat dengan Presiden Roh sejak masa pemerintahan Presiden Roh, membuat pendekatan Presiden Moon terhadap kebijakan *Sunshine* merupakan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat Korea Selatan. Presiden Moon terlibat dalam hampir semua kebijakan pemerintahan Presiden Roh terhadap Korea Utara. Baik dalam perancangan kebijakannya maupun aktivitas implementasinya. Namun, untuk menarik dukungan dari semua masyarakat, mengingat lawannya adalah konservatif, Presiden Moon mengklaim bahwa kebijakannya merupakan kebijakan yang baru, meskipun sebenarnya Presiden Moon juga masih mempertahankan beberapa nilai yang sebelumnya ada pada kebijakan *Sunshine* (Jongju, 2017).

Diantaranya ada pertahanan nasional yang kuat, dukungan kuat aliansi dengan Amerika Serikat, dan prioritas utama untuk menghentikan program misil dan nuklir Korea Utara. Namun, yang berbeda dari Presiden Moon adalah adanya pengakuan bahwa Korea Selatan dan Korea Utara sama-sama bersalah karena keras kepala dan menyalahkan satu sama lain. Presiden Moon kemudian melanjutkan bahwa unifikasi dan kesejahteraan bagi kedua negara tidak akan tercapai apabila kedua belah pihak masih keras kepala. Maka dengan mewarisi kebijakan *Sunshine*, Presiden Moon menyatakan akan mendorong Korea Utara pada perubahan dengan cara yang strategis. Presiden Moon juga menyatakan bahwa Korea Selatan akan menjadikan unifikasi ekonomi sebagai tujuan prioritas, sehingga baik Korea Selatan dan Korea Utara dapat sejahtera. Korea Selatan akan mengambil inisiatif memimpin tindakan terkait unifikasi baik dengan Korea Utara, Amerika Serikat, maupun pihak-pihak lain yang terlibat (Jongju, 2017).

Presiden Moon yang ingin meneruskan kebijakan *Sunshine* terlihat dari anggota parlemen yang ditunjuk. Khususnya terlihat dari dua anggota parlemen tertunjuk yang spesifik ditujukan untuk mengurus masalah Korea Utara. Dua anggota tersebut adalah penasihat hubungan internasional dan keamanan nasional, yaitu Profesor Moon Chung-in, yang juga menjabat jabatan yang sama pada masa pemerintahan Presiden Kim Dae-jung dan Roh Moo-hyun. Moon sendiri merupakan akademisi yang vokal mengadvokasi Kebijakan *Sunshine*. Pada tahun 2012, Profesor Moon merilis buku yang membela kebijakan *Sunshine*, meskipun pada saat itu Korea Utara telah meluncurkan dua tes nuklir dan beberapa tes roket dan misil yang melanggar resolusi UNSC dan permintaan Korea Utara dalam dialog *Six-Party Talks* di Beijing. Sedangkan sebagai kepala staf, Presiden Moon memilih Im Jeong-seok, yang sebelumnya merupakan pemimpin aktivis mahasiswa berprestasi Korea Selatan yang terlibat pemindahan ilegal

mahasiswa Korea Selatan ke Korea Utara pada tahun 1989 yang sempat menjadi kontroversi. Im juga menjadi koordinator kampanye Presiden Moon. Im juga memegang peranan penting dalam *détente* Korea Selatan dan Korea Utara yang semakin meningkat dengan adanya *Winter Games* di Pyeongchang. Im juga menjadi salah satu perwakilan Korea Selatan atas undangan pertemuan oleh Kim Jong-un (John, 2017).

Presiden Moon sendiri melihat unifikasi sebagai proses, bukan sebagai hasil, yang berkaca pada unifikasi Jerman. Proses tersebut menurut Presiden Moon, membutuhkan keberlanjutan dan konsistensi dalam kebijakan yang meningkatkan kerjasama dan interaksi bagi kedua negara Korea, meskipun sedang terjadi perubahan kondisi politik di Korea Selatan (Jae-in, 2017).

Presiden Moon kemudian membuat kebijakan baru, yaitu KPPI atau *Korean Peninsula Peace Initiative*, sebagai kelanjutan dari Kebijakan *Sunshine* dan mengemban visi kembalinya hubungan baik Korea Selatan dan Korea Utara berdasarkan prinsip-prinsip Deklarasi Bersama 15 Juni dan Deklarasi 4 Oktober. KPPI mengedepankan lima arah kebijakan dan tujuan secara umum dari kebijakan Presiden Moon terkait Korea Utara. Poin pertama menegaskan kepercayaan Korea Selatan terhadap unifikasi di Semenanjung Korea sebagai tujuan utama. Untuk meyakinkan Korea Utara, Presiden Moon menekankan adanya *four no* yang akan mendasari KPPI. *No* yang pertama adalah tidak adanya penggunaan senjata dan kekerasan, *no* kedua yaitu tidak adanya keinginan untuk menjatuhkan atau mengubah rezim, *no* ketiga adalah tidak ada unifikasi melalui dominasi ekonomi, *no* yang keempat adalah tidak ada unifikasi semu (Jae-in, 2017).

Poin kedua berfokus pada denuklirisasi di Semenanjung Korea. KPPI menawarkan pendekatan tahap demi tahap dan komprehensif untuk menemukan solusi atas permasalahan nuklir. Pendekatan tersebut didasari pada kepercayaan bahwa permasalahan nuklir tidak dapat diselesaikan tanpa membahas permasalahan yang lebih besar yaitu permasalahan pertahanan dan isolasi diplomatis Korea Utara. Pendekatan tahap demi tahap diawali dengan menghentikan tes nuklir dan misil dan menghentikan program nuklir Korea Utara. Sedangkan pendekatan komprehensif sendiri mengupayakan perubahan perjanjian bersenjata menjadi perjanjian perdamaian antara Korea Utara dengan dunia internasional, yang juga akan menghentikan isolasi diplomatis di Pyongyang dan meningkatkan hubungan dengan Jepang dan Amerika Serikat (Jae-in, 2017). Poin ketiga adalah KPPI berusaha mengupayakan institusionalisasi proses perdamaian di hubungan Korea Selatan dan Korea Utara.

Analisis Pengaruh Identitas Nasional Korea dalam Kebijakan Unifikasi Presiden Korea Selatan

Identitas nasional Korea Selatan mengalami sejarah panjang dalam perkembangannya. Mulai dari keinginan untuk menjadi negara demokrasi karena berkiblat pada negara Barat, khususnya Amerika Serikat, hingga pemerintahan militer yang sempat menolak demokrasi pada tahun 1980-an. Identitas nasional Korea Selatan terkait Korea Utara juga sempat mengalami perubahan, yang awalnya tidak mengakui komunis Korea Utara, hingga kemudian berusaha membuka diri pada komunis demi kelancaran unifikasi pada era pemerintahan Presiden Kim Dae-jeong (Hyeo-jong, 2004). Namun, Identitas nasional Korea Selatan sebagai negara yang mempromosikan perdamaian bagi kawasan, khususnya Semenanjung Korea, yang digagas sejak pemerintahan presiden pertama Park Chung-hee tetap menjadi dasar kebijakan-kebijakan unifikasi oleh Korea Selatan bahkan hingga masa pemerintahan Presiden Moon Jae-in sekarang ini seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Pada bab ini sendiri, peneliti menganalisis pengaruh identitas nasional Korea Selatan dalam pengambilan kebijakan luar negeri Korea Selatan terkait unifikasi menggunakan *Level of Analysis: National Identity*. Pada analisis ini, pengaruh identitas nasional Korea Selatan dianalisis dalam tiga *layer*. Yaitu *layer* pertama, bagaimana Korea Selatan melihat dirinya sebagai negara yang terletak di Semenanjung Korea. *Layer* kedua, adalah bagaimana Korea Selatan mendefinisikan Korea Utara, apakah sebagai saudara atau musuh. Pada *layer* kedua, identitas Korea Utara dianalisis dalam tingkatan masyarakat sipil dan tingkat pemerintah. *Layer* yang ketiga adalah, pengaruh pandangan Korea Selatan terhadap dirinya dan Korea Utara tersebut berpengaruh dalam kebijakannya.

***Layer* Pertama: Posisi Korea Selatan di Semenanjung Korea**

Kolonialisme Jepang membuat Korea Selatan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi untuk dapat menjadi negara berdaulat yang didorong oleh nilai-nilai lokal atau *Tohak* (Shamanisme dan Konfusianisme) serta ajaran Kristen yang mengalami indigenisasi, atau *Sohak* (Seth, 2011). Adanya separasi di Semenanjung Korea menjadi tragedi yang paling mengerikan yang pernah terjadi bagi Korea Selatan. Dengan adanya nasionalisme tersebut, menjadikan separasi semakin menjadi tragedi yang ingin diperbaiki oleh Korea Selatan. Pada awal berdirinya Korea Selatan, yaitu ketika paska kemerdekaan, Presiden Syngman Rhee menginginkan adanya agresi kepada Korea Utara, namun karena adanya desakan dunia internasional, khususnya Amerika Serikat, mempromosikan demokrasi dan menginginkan upaya unifikasi pada saat itu dilakukan melalui dialog, maka Korea Selatan mau melakukan negosiasi dengan Korea Utara dan mengadopsi sistem demokrasi tersebut. Pada masa pemerintahan Presiden Rhee, hal tersebut dilakukan karena Korea Selatan ingin memperkuat

kedudukannya di Semenanjung Korea dengan semakin diakuinya kedudukannya oleh negara internasional (Institute for National Security Strategy, 2006).

Namun, Korea Selatan mengubah identitasnya di Semenanjung Korea secara drastis ketika Presiden Park memerintah. Presiden Park mengambil pendekatan dan melakukan restrukturisasi identitas nasional Korea Selatan. Hal tersebut dilakukan melihat dari upaya Presiden Rhee yang usahanya menggunakan agresi ditentang oleh dunia internasional (Hak-joon, 1977). Selain itu, adanya trauma paska perang dan melihat banyaknya kerugian yang disebabkan karena peperangan membuat Presiden Park tidak ingin adanya pertumpahan darah lagi di Semenanjung Korea. Presiden Park yang juga melihat bahwa tragedi pertumpahan darah yang terjadi di Semenanjung Korea hingga mengakibatkan separasi bukan keinginan bangsa Korea sendiri, melainkan karena keinginan negara lain, membuat trauma akan kekerasan semakin menguat. Bahkan Korea Selatan mengklaim menjadi promotor perdamaian, khususnya di Semenanjung Korea. Dunia internasional sendiri pada masa pemerintahan Presiden Park, yaitu pada tahun 1970-an, juga sedang gencar-gencarnya mempromosikan perdamaian dan mengaungkan perdamaian di berbagai kebijakan (Chung-hee, 1976).

Nilai-nilai yang ditanamkan oleh Presiden Park terkait Korea Selatan sebagai negara yang memprioritaskan perdamaian tersebut kemudian diadopsi oleh presiden-presiden Korea Selatan selanjutnya, khususnya presiden-presiden yang memang berkomitmen dengan upaya unifikasi sebagai prioritas kebijakan luar negerinya. Pada Kebijakan Sunshine yang mulai dibuat pada pemerintahan Presiden Kim Dae-jung sendiri, perdamaian tetap menjadi prinsip dasar yang dianut. Selaian itu, dalam kebijakan Sunshine, perbaikan hubungan Korea selatan dan Korea Utara juga diupayakan dengan kerjasama, baik dibidang ekonomi, maupun kemanusiaan. Pada prinsi-prinsipnya, kebijakan Sunshine juga mengedepankan dialog untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan diantara Korea Selatan dan Korea Utara. Kebijakan Sunshine itu sendiri kemudian diteruskan oleh Presiden Roh Moo-hyun dan Moon Jae-in (Straub, 2017).

Layer Kedua: Definisi Korea Utara bagi Korea Selatan

Arti Korea Utara bagi Korea Selatan juga mengalami perubahan sejak era paska Perang Korea, khususnya pada era Presiden Rhee, hingga masa pemerintahan Presiden Moon saat ini. Seperti identitas Korea Selatan di Semenanjung Korea yang mengalami perubahan, identitas Korea Utara bagi Korea Selatan sendiri juga mengalami perubahan (Hyeo-jeong, 2004). Pada masa tahun-tahun awal kemerdekaan Korea Selatan, Korea Utara dianggap sebagai musuh karena memiliki ideologi yang berseberangan dengan Korea Selatan, dan juga atas serangan-serangan yang dikirimkan oleh Korea Utara ke Korea Selatan. Adanya kekeraskepalaan Korea Utara terhadap ideologi Komunis dan adanya konflik-konflik antara kelompok sayap kanan dan sayap kiri yang terjadi pada masa persiapan kemerdekaan membuat Korea Selatan yang saat itu dipimpin oleh Presiden Rhee yang merupakan pemimpin sayap kanan, enggan mengakui Korea Utara sebagai saudara sebangsa (Hak-joon, 1977).

Namun, sejak masa pemerintahan Presiden Park Chung-hee, identitas Korea Utara bagi Korea Selatan juga bergeser. Presiden Park melihat adanya peristiwa separasi ini merupakan kejadian yang tidak diinginkan oleh bangsa Korea, yaitu baik oleh Korea Selatan dan Korea Utara. Apalagi bagi bangsa yang sadar akan kesamaan budaya, dan homogenitas ras, serta sejarah panjang sebagai bangsa yang bersatu sebagai identitas politiknya, adanya intervensi militer sendiri sudah menjadi peristiwa yang tidak diinginkan untuk terjadi. Oleh karena itu, separasi sendiri merupakan tragedi paling tidak diinginkan yang terjadi di Semenanjung Korea. Sehingga, Presiden Park melihat bahwa Korea Utara juga menjadi korban dalam tragedi tersebut. Karena adanya prioritas perdamaian yang dijunjung Korea Selatan dalam kebijakan luar negerinya pada masa pemerintahan Presiden Park ini, maka Korea Selatan berusaha mencari jalan agar Korea Utara mau sedikit meredakan permusuhan terhadap Korea Selatan dan bersedia melakukan dialog dengan Korea Selatan. Korea Selatan kemudian mengubah identitas Korea Utara, Korea Utara dianggap sebagai saudara sebangsa yang terpisah karena keadaan dan paksaan pihak eksternal. Korea Utara tidak dianggap sebagai musuh namun sebagai saudara dengan identitas yang sama. Hal tersebut dibuktikan Korea Selatan dengan penyebutan Korea Utara dengan kata *brother* di dalam pidato¹ Presiden Park. Presiden Park

¹ Pidato tersebut dilaksanakan oleh Presiden Park dalam acara Penandatanganan Pakta Non-agresi Korea Selatan dan Korea Utara. Selengkapnya dapat dilihat dalam Chung-hee, Park. *Toward Peaceful Unification: Selected Speeches and Interviews*. Kwangmyong Publishing Company: Seoul, Korea. 1976.

sendiri juga berhasil meyakinkan masyarakat Korea untuk melihat Korea Utara dari perspektif baru demi terwujudnya keinginan untuk unifikasi dengan cara damai (Chung-hee, 1976).

Namun, masyarakat sipil Korea Selatan sendiri mempunyai pendekatan yang berbeda terhadap Korea Utara, khususnya dalam permasalahan unifikasi. Masyarakat Korea Selatan mempertanyakan kebijakan unifikasi dengan asas perdamaian yang ingin diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan. Permasalahan nuklir yang dianggap menjadi alasan masyarakat Korea Selatan enggan melakukan unifikasi bukan satu-satunya permasalahan yang dikhawatirkan oleh masyarakat sipil Korea Selatan. Masyarakat Korea Selatan justru mengkhawatirkan permasalahan yang akan muncul ketika kedua negara bersatu nantinya. Keraguan, ketakutan bahkan penolakan akan unifikasi semakin tumbuh di kalangan masyarakat sipil Korea Selatan, khususnya generasi muda, meskipun secara gagasan dan pemikiran unifikasi masih menjadi gagasan yang kuat di Korea Selatan. Pada tahun 1994, sebanyak 92% masyarakat Korea Selatan mendukung unifikasi, namun dukungan menurun pada tahun 2007 menjadi 64%. Survey yang dilakukan Seoul National University juga mencatat pada tahun 2010, generasi muda yang menudukung unifikasi hanya 49%, sedangkan generasi tua masih cukup tinggi yaitu sebanyak 67% (Braniga, 2013).

Layer Ketiga: Pengaruh Identitas Nasional Korea Terhadap Kebijakan Unifikasi

Kebijakan Korea Selatan terkait unifikasi baru membuahkan hasil ketika Presiden Park Chung-hee menjabat. Dengan pendekatan baru yang jauh berbeda dengan kebijakan presiden-presiden sebelumnya, upaya Presiden Park Chung-hee berhasil menghasilkan pencapaian-pencapaian bersejarah terkait upaya unifikasi. Dengan restrukturisasi kebijakan dan identitas nasional Korea Selatan, berbagai dialog berhasil diselenggarakan dan ketegangan berhasil diredakan. Presiden Park yang mulai memprioritaskan perdamaian sebagai tujuan Korea Selatan, dan mengklaim peran aktif Korea Selatan dalam menciptakan perdamaian, khususnya di Semenanjung Korea, membuat semua upaya unifikasi dilakukan melalui jalur negosiasi dan dialog.

Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara dapat dikatakan mengalami peningkatan yang baik ketika masa pemerintahan Presiden Moon. Meski Korea Utara masih enggan untuk menjalin kerjasama secara total dengan Korea Selatan, dikarenakan Korea Selatan dinilai Korea Utara masih memihak Amerika Serikat yang memusuhi Korea Utara. Hal tersebut tidak menyurutkan koitmen Presiden Moon akan upaya memperbaiki hubungan kedua negara Korea.

Presiden Moon kemudian memanfaatkan media *Winter Olympics* di Pyongyang untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara. Presiden Moon juga secara eksplisit mengakui meneruskan cara-cara yang digagas oleh Presiden Kim Dae-jung dan Roh Moo-hyun sebelumnya. Pada pidato Presiden Moon terkait Korea Utara yang pertama kali sejak menjadi presiden yang dilaksanakan di Berlin pada tanggal 6 Juli 2017, Presiden Moon mengatakan bahwa bahwa berkaca pada unifikasi Jerman, Presiden Moon menyadari pentingnya proses perdamaian dan kerjasama berdasarkan penghormatan untuk satu sama lain. Presiden Moon juga mengutip kebijakan *Sunshine* Presiden Kim Dae-jung dan Roh Moo-hyun, menyatakan bahwa dengan mewarisi kebijakan kedua presiden sebelumnya, yaitu Presiden Kim dan Roh, Presiden Moon berkomitmen terhadap perjalanan panjang untuk menciptakan rezim yang damai di Semenanjung Korea (Hyun-jung, 2018).

KESIMPULAN

Unifikasi antara Korea Selatan dan Korea Utara menjadi fakta yang perkembangannya selalu dinantikan di dunia internasional. Dari pemaparan diatas dapat terlihat bahwa terdapat korelasi langsung antara adanya saksi sejarah yang membuktikan bahwa Korea Selatan dan Korea Utara berasal dari identitas yang sama sebelum kemudian muncul pengaruh-pengaruh eksternal yang akhirnya memisahkan Semenanjung Korea. Bagaimana identitas nasional Korea Selatan dan identitas Korea Utara bagi Korea Selatan kemudian mempengaruhi pendekatan kebijakan luar negeri Korea Selatan yang lebih mengutamakan perdamaian dan berkomitmen tidak akan menggunakan cara agresi dan intimidasi. Meskipun begitu, dari perspektif masyarakat sipil Korea Selatan yang semakin menunjukkan keengganan untuk bersatu membuat public internasional mempertanyakan efektifitas kebijakan unifikasi Korea Selatan tersebut. Oleh sebab itu, identitas nasional Korea belum menunjukkan dampak yang signifikan dalam arah kebijakan luar negeri Korea Selatan terkait unifikasi dengan Korea Utara. Oleh karena itu, identitas nasional hanya berpengaruh dalam kebijakan pemerintah, tidak turut pula berpengaruh terhadap keinginan Korea Selatan untuk bersatu kembali dengan Korea Utara, hal tersebut karena, masyarakat Korea Selatan sendiri mempunyai sikap yang berbeda dengan pemerintah Korea Selatan terkait unifikasi.

